



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN SETIADI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 658092

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/60 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/112 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA MEMPAWAH, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA MEMPAWAH, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 33.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 100 CC Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC 110 CC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2PV MX KING 150 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT MATIC 110 C C Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 142.750.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 105.007.475**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 930.757.475

III. HUTANG

Rp. 500.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 430.757.475

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.